

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan di Indonesia telah memberikan peranan penting yang sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara, baik peranannya menjaga keseimbangan ekonomi nasional maupun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Sektor ini telah menjadi alat mediator keuangan yang cukup efektif bagi pemerintah dan masyarakat dalam lalu lintas peredaran uang serta pemberian kredit. Jasa keuangan yang dilakukan oleh bank disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya berupa memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan dalam memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.

Sejak pertengahan 1997 memasuki krisis moneter terjadi penurunan kinerja bank. Kondisi krisis pada saat itu lebih didominasi oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Hal ini mempunyai dampak yang sangat luas, seperti banyaknya bank yang tidak bisa memenuhi kewajibannya. Akibatnya, para pemilik dana menarik kembali dana yang mereka

simpan, karena khawatir akan keamanan harta kekayaan mereka yang disimpan di bank.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu lembaga perbankan di Indonesia yang tidak luput masalah-masalah yang ditimbulkan dari krisis ekonomi. BPR dituntut untuk tetap bertahan hidup dan berkembang didalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai hasil operasional yang memuaskan, salah satu cara dalam pengelolaan usaha BPR telah melakukan sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari tingkat kinerja keuangan BPR yang bersangkutan.

Perkembangan industri BPR secara nasional telah menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan, seperti tercermin pada peningkatan beberapa indikator kinerja. Volume usaha BPR mengalami peningkatan sebesar 39%, yang terutama disumbang oleh simpanan masyarakat dan kredit yang diberikan. Sementara itu penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan meningkat 30% dengan 5,6 juta penabung, sedangkan deposito meningkat sebesar 4,8% dengan 438 ribu deposan. Dari sisi kredit yang diberikan terjadi peningkatan sebesar 36% dengan jumlah debitur sebanyak 2,5 juta nasabah, (Purnama, 2009).

Industri BPR di atas didukung oleh kelembagaan yang terdiri dari 1.767 kantor BPR, 138 kantor cabang dan 470 kantor pelayanan kas. Sebanyak 86 kantor dari jumlah tersebut merupakan BPR dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa 80% kantor BPR berlokasi di Jawa yang mana menunjukkan perlu adanya upaya untuk mendorong pendirian BPR di luar Jawa.

Berdasarkan data Bank Indonesia, total aset BPR pada skala nasional wilayah Jawa memiliki nilai terbesar. Namun pada kenyataannya besarnya total aset yang dimiliki belum menjamin kinerja keuangan BPR berbeda signifikan dengan wilayah lain di Indonesia. Berikut total aset BPR konvensional di Indonesia pada tahun 2009.

Tabel 1. Rekapitulasi Total Aset BPR Konvensional di Indonesia

| No | Wilayah | Jumlah BPR Konvensional | Total Aset |
|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Jawa | 1 ,178 | Rp 24,283,378,330 |
| 2 | Sumatera | 255 | Rp 7,523,153,167 |
| 3 | Bali | 142 | Rp 2,663,314,478 |
| 4 | Kalimantan | 53 | Rp 3,186,229,895 |
| 5 | Sulawesi | 58 | Rp 924,791,337 |
| 6 | Nusa Tenggara | 72 | Rp 643,754,016 |
| 7 | Maluku | 3 | Rp 211,301,622 |
| 8 | Papua | 6 | Rp 215,373,915 |
| Total Aset Skala Nasional | | | Rp 37,554,284,562 |

Dari data tersebut dapat dilihat perbedaan total aset wilayah Jawa lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Akan tetapi pada tahun yang sama Bank Indonesia telah menetapkan 17 BPR di Jawa dengan predikat dalam perhatian khusus. Keputusan ini diambil disebabkan munculnya BPR baru yang masih belum memenuhi rasio kecakupan modal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Seperti diketahui menurut PBI nomor 8/26/PBI/2006 pasal 4 tentang pendirian BPR telah ditetapkan modal setoran minimum sebagai berikut :

1. Rp. 5.000.000.000 untuk BPR di wilayah khusus ibukota DKI Jakarta.
2. Rp. 2.000.000.000 untuk BPR di wilayah ibukota provinsi Jawa.
3. Rp 1.000.000.000 untuk BPR di wilayah ibukota luar Jawa.

Dari ketentuan tersebut Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) lebih menekankan para investor yang terjun ke industri BPR untuk membuka cabang di luar Jawa, sebagai alternatif dimana masalah yang biasa dihadapi BPR baru dalam memenuhi rasio kecakupan modal bisa diatasi.

Dilihat dari segi letak geografis, luas wilayah dan jumlah penduduknya, wilayah Sumatera merupakan salah satu daerah yang mampu menjadi prospek perkembangan industri BPR. Pada tahun 2009 BPR Sumatera memiliki total aset Rp. 7,5 triliun yang diproyeksikan akan terus naik untuk tahun-tahun berikutnya. Disisi lain, Bank Indonesia telah mencanangkan proses mediasi melalui *Linkage Program* atau penyaluran kredit oleh bank umum melalui BPR yang dapat membantu dalam mengembangkan kegiatan sasaran industri BPR pada sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM). Hal ini dimaksudkan agar yang dahulu timbul persaingan berubah menjadi hubungan sinergi yang positif antara bank umum dan BPR. Sehingga pelaku industri BPR dapat tetap hidup dan berkembang sebagai lembaga keuangan yang mampu dipercaya masyarakat.

Agar BPR dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menunjang pemeliharaan stabilitas ekonomi, maka dalam menjalankan usahanya harus senantiasa menjaga tingkat kesehatan bank yang menunjukkan kinerja usaha dari

bank tersebut. Untuk mengukur kinerja suatu bank dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, kemampuan pencapaian laba atau rentabilitas, dan likuiditas bank.

Salah satu cara untuk mengetahui kondisi keuangan yang menunjukkan kinerja suatu BPR dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan secara periodik antara BPR di daerah Jawa dan Sumatera. Mengingat pentingnya informasi kinerja keuangan perbankan, merupakan salah satu upaya untuk membantu para pelaku bisnis menilai kondisi keuangan dengan melakukan analisis laporan keuangan. Adapun komponen-komponen yang tersaji pada laporan keuangan BPR, antara lain mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan komitmen dan kontijensi, laporan laba rugi, laporan aktiva produktif, dan informasi lainnya yang terkait dengan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di ataslah yang kemudian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BPR KONVENSIONAL YANG BERADA DI JAWA DAN SUMATERA”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR Konvensional yang berada di Jawa dan Sumatera berdasarkan rasio CAMELS ?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini memberikan manfaat maka untuk dapat memusatkan permasalahan pada penelitian ini, ditetapkan batasan dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada BPR Konvensional yang berada di daerah Jawa dan Sumatera yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Analisis dilakukan dengan memusatkan pada laporan keuangan BPR Konvensional yang mempublikasikan laporan keuangannya pada periode 2007-2009.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR Konvensional yang berada di Jawa dan Sumatera tahun 2007-2009 berdasarkan rasio CAMELS.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi pihak BPR yang diteliti, hasil penelitian dapat digunakan sebagai tolak ukur manajemen untuk mengelola usahanya agar menghasilkan kinerjanya menjadi lebih baik.
- b. Bagi investor, hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan untuk menanamkan investasi sahamnya ke dalam industri BPR.

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian dapat dijadikan sumbangan informasi dan pengembangan wawasan mengenai kinerja keuangan BPR saat ini.
- d. Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang dipelajari selama kuliah ke dalam dunia penelitian.